

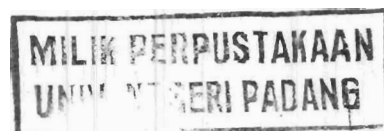
Strategi Pengembangan Perpustakaan Sekolah di Era Informasi

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
TERIMA BEL.	: 19-12-2013
SUMBER HARGA:	Hd
COLEKSI	: K1
NO. INVENTARIS	: 225/Hd/2013 .S.1(1)
Oleh	KLASIFIKASI :
Januarisdi	

Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang

Disajikan pada
Kegiatan Bimbingan Teknis
Pengelola Perpustakaan Sekolah se-Kota Padang
Tanggal 3 dan 4 Juni 2013

Kantor Arsip dan Perpustakaan dan Dokumentasi Kota Padang
2013



Strategi Pengembangan Perpustakaan Sekolah di Era Informasi

Oleh

Januarisdi

Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Padang

Pendahuluan

Jargon “Perpustakaan merupakan jantung pendidikan” barangkali bukan hanya sudah basi, tapi sudah menjadi “olok-olok” retorika setiap orang yang berdiri di podium. Sejak tiga dekade yang lalu, jargon ini sudah bergema dikomandangkan, tapi nyatanya hari ini “sang jantung” masih tetap begitu-begitu juga—kronis. Dari sisi kelembagaan, perpustakaan masih tetap tidak ikut dalam sistem pengambilan keputusan; dari sisi ketenagaan, perpustakaan sekolah masih belum mempunyai pustakawan yang berkualifikasi kepustakawanan; dari sisi koleksi, perpustakaan sekolah masih didominasi oleh buku paket dan buku ajar; dari sisi ruangan dan fasilitas pendukung lainnya, perpustakaan sekolah masih jauh dari standar sebuah perpustakaan sekolah era informasi. Dengan keadaan demikian, kita tidak perlu kecewa terhadap produk sistem pendidikan kita seperti yang kita saksikan sekarang ini.

Persolaan yang terkiat dengan keadaan seperti ini memang multi dimensional. Persoalan tersebut meliputi berbagai persoalan, mulai dari persoalan klasik sumber daya finansial dan sumber daya manusia, sampai ke persoalan birokrasi dan keberpihakan politis. Persoalan tersebut satu sama lain saling terkait sehingga pemecahannya tidak dapat dilakukan secara parsial. Persoalan sumber daya finansial dan sumber daya manusia tidak akan pernah terpecahkan bila persoalan birokrasi dan keberpihakan politis masih menjadi kedala. Persoalan kebijakan poliits dan birokrasi masih tetap seperti apa adanya jika sumber daya manusia perpustakaan tidak memenuhi standar kualifikasi yang seharusnya. Ringkasnya, persoalan yang melilit perpustakaan sekolah sudah menjadi sebuah penyakit kronis dan *complicated*.

Ditengah keadaan seperti itu, kita tidak perlu menyerah; secara optimis kita tetap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk itu, tulisan ini membahas strategi pengembangan perpustakaan sekolah, salah satu topik yang diharapkan bisa memberikan inspirasi bagi pengelola perpustakaan sekolah untuk melakukan sesuatu yang bermakna walaupun sederhana. Tulisan ini mencakup isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan perpustakaan sekolah, antara lain perencanaan perpustakaan sekolah, pengembangan keorganisasian, pengembangan koleksi, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengembangan sumber daya finansial. Pada bagian akhir, tulisan ini memperkenalkan isu literasi informasi sebagai kompetensi dasar pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*).

PERENCANAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Untuk lebih meyakinkan kita terhadap pentingnya keberadaan perpustakaan sekolah dalam era informasi sekarang ini, perlu kita fahami hakikat informasi (*information*) itu sendiri. Walaupun istilah ini sudah sangat akrab di lidah dan telinga masyarakat di seantero dunia, barangkali tidak terlalu banyak mereka yang benar-benar memahami hakikat informasi tersebut. Banyak orang mengaku bahwa mereka “mendengar informasi”, “melihat informasi” atau “memperoleh informasi” dari orang lain atau dari sebuah dokumen tertentu. Padahal informasi tersebut tidak pernah bisa dilihat, didengar atau diperoleh oleh seseorang dari orang lain atau dokument tertentu. Yang mereka dengar tidak lebih dari rangkaian bunyi dari sumber tertentu; yang mereka lihat tidak lebih dari tulisan atau karakter tercetak atau tertulis tang di atas media tertentu seperti kertas atau layar monitor. Apakah mereka memperoleh informasi dari sumber diluar diri mereka?

Pada dasarnya, manusia adalah *information creator* (pencipta informasi) yang menciptakan informasi dalam sistem otaknya sendiri. Setelah mendengar rangkaian bunyi, melihat rangkaian tulisan atau karakter mereka melaku pengolahan dan pencernaan dengan pola jika-maka (*If-then*) dan seterusnya, mereka menciptakan, mengkreasikan atau mengarang dan melahirkan informasi baru. Informasi tersebut bukan diperoleh dari sumber luar dirinya, tapi ia karang/ ciptakan sendiri dalam sistem kognisinya. Dengan demikian kita

dapat memahami bahwa informasi adalah properti abstrak yang hanya pernah ada dalam otak seseorang dan tidak pernah keluar. Yang keluar hanya simbol berupa bunyi atau suara, gambar (bergerak atau tidak), dan tulisan atau karakter dan sebagainya yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi yang tercipta dalam otak seseorang.

Kondisi seperti ini digambarkan oleh Alvin Tofler (1980) dalam karyanya "*The Third Wave*" sebagai era informasi. Dalam bukunya yang merupakan seri kedua dari sebuah trilogi tersebut, ia menggambarkan bahwa perkembangan sejarah peradaban manusia telah memasuki gelombang ketiga—*postindustrial age (information age)* setelah melewati *agrecultural age* dan *industrial age*. Perkembangan ini telah mengubah berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk dunia pendidikan dan pembelajaran. Era Informasi (*information era*) yang disebut juga dengan Zaman Pasca-Modern (*Post-modern age*) ditandai pula oleh perubahan paradigma pendidikan dan pembelajaran yang sangat berarti.

Era informasi secara sangat signifikan mengubah paradigma pendidikan dan pembelajaran. Paradigma pembentukan perilaku (*behaviorism*) yang memang tepat untuk masyarakat era industri abad ke-17 sampai abad 20, sudah tidak relevan lagi diterapkan pada abad ke-21 sekarang ini. Paradigma pendidikan dan pembelajaran era pasca-modern ini adalah pemberian kemampuan belajar (*learning empowering*) sehingga terbangun sebuah masyarakat belajar mandiri sepanjang hayat. Keberadaan guru/ dosen, profesor, ustadz, dan kyai yang selama ini dianggap sebagai penguasa ilmu pengetahuan, sekarang tidak lagi dianggap sentral pembelajaran dan pendidikan. Setiap orang (pelajar) sudah mampu memanfaatkan sumber alternatif yang kemampuannya tidak terbatas seperti kemampuan guru, dosen, profesor, ustadz dan kyai. Pusat pembelajaran era informasi ini adalah pelajar itu sendiri, yang dikenal dengan istilah *students learning-centered*. Oleh karena ini mereka harus dibekali dengan kompetensi pembelajaran yang optimal.

Dengan pemahaman tentang informasi dan paradigma pembelajaran era informasi seperti yang dipaparkan di atas, kita harus yakin bahwa merencanakan perpustakaan sekolah bukan sekadar membuat agenda yang akan dikerjakan besok, dalam waktu seminggu, sebulan atau setahun. Merencanakan perpustakaan sekolah pada dasarnya adalah mencernakan kehidupan bangsa yang intinya adalah peradaban. Tidak berlebihan kita

menyimpulkan demikian, kalau kita menyadari bahwa sekolah adalah wadah primer pendidikan formal bangsa yang akan menjamin keberlanjutan sebuah bangsa. Keberhasilan perpustakaan menyusun perencanaannya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang tentunya akan mempengaruhi keluaran atau produk sekolah—sumber daya manusia.

Secara umum kita bisa mengelompokkan perencanaan perpustakaan sekolah atas dua kategori: 1) perencanaan strategis, dan 2) perencanaan operasional. Perencanaan strategis adalah perencanaan yang mencakup jangkauan waktu yang sangat panjang antara 10 sampai 25 tahun, walaupun kita masih menemukan rencana strategis sebuah organisasi mencakup rentang waktu kurang dari 10 tahun. Namun demikian, untuk kepentingan perpustakaan sekolah, perencanaan strategis yang paling ideal mencakup jangkauan waktu antara 10 sampai 15 tahun. Perencanaan strategis perpustakaan sekolah yang kurang dari 10 tahun sering mengarah ke kebijakan yang bersifat “bongkar-pasang”. Jika perencanaan perpustakaan sekolah terpaksa harus mencakup waktu yang kurang dari 10 tahun, perencanaan ini hendaknya dimasukkan kedalam perencanaan operasional yang bisa dirancang untuk jangka waktu lima tahun.

Rencana strategis perpustakaan sekolah sekurang-kurangnya mencakup tiga poin penting: 1) visi, misi, dan tujuan, 2) strategi pencapaian, 3) indikator ketercapaian. Ketiga elemen rencana strategis perpustakaan ini harus dirancang menjadi sebuah dokumen resmi sekolah sehingga pergantian kepemimpinan sekolah tidak akan mengubah arah pengembangan perpustakaan sekolah. Oleh karena itu, penyusunan rencana strategis pengembangan perpustakaan sekolah harus melibatkan berbagai pihak yang mewakili sekurang-kurangnya tiga pihak: 1) unsur manajemen sekolah, 2) pustakawan, dan 3) pakar dalam bidang perpustakaan dan pendidikan. Penyusunan rencana strategis perpustakaan sekolah ini dapat dilakukan secara kolektif dalam bentuk loka karya.

Dalam hal perumusan visi perpustakaan sekolah, satu hal yang sangat penting diperhatikan adalah pemahaman kita tentang perpustakaan sekolah. Visi, pada dasarnya, adalah cara kita memandang lembaga kita pada masa yang akan datang. Dengan pemahaman yang jelas tentang hakikat perpustakaan sekolah, kita dapat merumuskan visi

yang tepat, jelas dan konsisten. Sehingga visi perpustakaan sekolah harus dirumuskan dalam bentuk kalimat deklaratif, seperti “Perpustakaan sekolah XX **adalah** pusat akses informasi bagi siswa dan guru untuk kepentingan pembelajaran dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkepribadian luhur” (sesuai dengan visi sekolah dan pemerintah daerah). Sehingga penggunaan kata “menjadi” pada awal rumusan visi sebuah lembaga, termasuk perpustakaan sekolah, dinilai sangat tidak relevan, karena kata itu tidak akan mempengaruhi jiwa mereka yang berada dalam lembaga tersebut.

Pada era pasca modern ini, misi perpustakaan sekolah harus sudah beralih dari penyediaan sumber pembelajaran (seperti buku, majalah jurnal dll) dan fasilitas pembelajaran (seperti ruang perpustakaan yang mewah dan nyaman) ke misi penyediaan akses ke sumber pembelajaran global dan pemberian kemampuan belajar (*learning empowering*). ALA/UNESCO merumuskan misi perpustakaan sekolah sebagai berikut:

“Perpustakaan sekolah menyediakan informasi dan ide yang merupakan fondasi agar berfungsi secara baik di dalam masyarakat masa kini yang berbasis informasi dan pengetahuan. Perpustakaan sekolah merupakan sarana bagi para murid agar terampil belajar sepanjang hayat dan mampu mengembangkan daya pikir agar mereka dapat hidup sebagai warga negara yang bertanggung jawab.” (IFLA, 2002: 6)

Dengan demikian misi perpustakaan sekolah tidak lagi terpaku pada apa yang selama ini menjadi momok pustakawan—mengelola buku teks dan buku ajar, majalah, jurnal dan sebagainya. Tidak ada pilihan lain, jika bangsa ini benar-benar ingin keluar dari persoalan yang multi dimensional ini, perpustakaan sekolah harus merumuskan kembali misinya seiring dengan perkembangan zaman saat ini dan kecenderungan masa yang akan datang. Penyediaan akses ke sumber informasi dan pengetahuan global serta pemberian kemampuan belajar yang lebih dikenal dengan istilah literasi informasi (*information literacy*) adalah misi utama yang tidak perlu lagi ditawarkan lagi.

Setelah misi perpustakaan sekolah jelas terformulasi dengan orientasi ke depan, langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah merumuskan tujuan perpustakaan sekolah. Tujuan perpustakaan sekolah pada dasarnya adalah sasaran jangka pendek yang merupakan tahap atau langkah pencapaian misi. Tujuan perpustakaan sekolah harus dirumuskan dalam

bentuk yang terukur bukan pernyataan abstrak sebagaimana misi dan visi. Perlu disadari bahwa kekeliruan yang sering ditemukan dalam rumusan tujuan organisasi adalah penggunaan kata kerja, sehingga tujuan yang berubah menjadi sebuah proses atau aktivitas—bukan tujuan yang hendak dicapai. Umpamanya, sebuah perpustakaan sekolah merumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan buku teks dan buku ajar sesuai kebutuhan proses pembelajaran.
2. Memberikan layanan refensi kepada siswa dan guru, baik secara online, maupun manual.
3. Dll.

Penggunaan kata “menyediakan” dan “memberikan” pada dua contoh diatas tidak tepat digunakan dalam rumusan tujuan perpustakaan sekolah karena kata-kata tersebut adalah kata kerja yang bermakna proses. Tujuan adalah “sesuatu “ yang hendak dicapai, yang tentunya kata benda, bukan kata kerja. Tujuan yang dirumuskan tersebut harus bisa diukur ketercapaiannya. Jika contoh tujuan diatas direvisi maka tujuan tersebut akan terformulasi sebagai berikut:

1. Meningkatnya (atau Peningkatan) kuantitas dan kualitas buku teks dan buku ajar yang sesuai kebutuhan pembelajaran.
2. Tersedianya layanan referensi yang baik bagi siswa dan guru, baik secara *online* maupun manual.
3. dst.

Bila tujuan telah terformulasi dengan sempurna, maka langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah menyusun strategi pencapaian tujuan. Dalam strategi ini tergambar langkah-langkah yang hendak dilakukan secara teknis dengan jadwal yang sudah jelas. Sehingga strategi pencapaian tujuan ini sering dirumuskan dalam bentuk program kerja atau program operasional yang biasanya memiliki rentang waktu satu tahun. Perlu pula disadari bahwa strategi pencapaian tujuan yang berupa program kegiatan ini harus dirumuskan dalam bentuk kegiatan, bukan pengadaan barang atau koleksi. Pengadaan barang/ alat atau koleksi dilakukan hanya karena tuntutan program kegiatan. Umpamanya, sebuah perpustakaan sekolah menyusun program kegiatan sebagai berikut:

1. Mengadakan buku teks dan buku ajar sesuai dengan kebutuhan pembelajaran.
2. Mengadakan fasilitas Internet untuk menjalankan layanan referensi online.
3. Dst.

Dua program kegiatan diatas adalah contoh yang tidak baik karena berorientasi pengadaan barang dan koleksi, bukan aktivitas. Dua program kegiatan diatas dapat direvisi sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koleksi buku teks dan buku ajar sesuai kebutuhan pembelajaran.
2. Meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan referensi bagi siswa dan guru.
3. dst.

Dengan demikian, pengadaan buku teks, buku ajar, koleksi referensi dan pengadaan fasilitas Internet adalah dampak dari program kegiatan yang telah dirumuskan tersebut. Tidak ada argumentasi tentang anggaran bila anggaran tersebut jelas dan sesuai dengan program yang telah dirumuskan.

Terakhir, perencanaan perpustakaan sekolah harus dilengkapi dengan indikator ketercapaian. Indikator ini dijadikan tolok ukur apakah tujuan yang telah dirumuskan diatas telah tercapai atau belum. Indikator ini sebaiknya dirumuskan dalam bentuk kuantitatif dengan memuatkan tiga fase pengukuran: kondisi terkini, kondisi pertengahan, dan kondisi akhir. Umpamanya, untuk tujuan "meningkatkan kualitas buku teks dan buku ajar sesuai kebutuhan pembelajaran", indikator ketercapaian dapat dirumuskan sebagai berikut: kondisi terkini umamanya, buku teks berjumlah 320 judul dengan kualitas 60% sesuai kebutuhan; buku ajar 400 judul dengan tingkat kesesuaian dengan kebutuhan 65 %; tujuan tengah (*middle term*) adalah buku teks berjumlah 700 judul dengan tingkat kesesuaian dengan kebutuhan 75%; buku ajar sebanyak 500 judul dengan tingkat kesesuaian 75%. Sementara tujuan akhir (*final term*) adalah buku teks berjumlah 500 judul dengan tingkat kesesuaian 85%; buku ajar sebanyak 800 judul dengan tingkat kesesuaian dengan kebutuhan 85%.

PENGEMBANGAN KEORGANISASIAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH

Persoalan yang sangat sering menghambat pengembangan perpustakaan sekolah secara optimal adalah keorganisasian. Walaupun secara retorika perpustakaan dinyatakan sebagai “organ penting”, “jantung” sekolah dan pendidikan, perpustakaan dalam organisasi sekolah tetap beda pada posisi yang tidak menguntungkan. Jarang sekali kita menemukan perpustakaan sekolah termasuk dalam jajaran eksekutif sekolah yang ikut dalam berbagai kegiatan pembuatan kebijakan pengembangan sekolah. Perpustakaan masih dianggap sebagai sarana penunjang, bukan sarana utama proses pembelajaran. Kondisi ini berlangsung terus sampai saat ini sebagai dampak dari orientasi pembelajaran era yang lalu dimana guru menjadi sentral proses pembelajaran. Ketergantungan siswa terhadap guru sebagai “super-power” pembelajaran seperti yang berlangsung pada era industri masih terasa sangat dominan pada era sekarang ini.

Secara fungsional, perpustakaan harus setingkat dengan majelis guru, karena kedua elemen sekolah ini sama-sama menjalankan tugas, tujuan dan misi akademik, bukan misi administratif. Perpustakaan adalah elemen fungsional yang fungsinya menjamin ketersediaan akses siswa dan guru ke sumber pembelajaran. Lebih dari itu, perpustakaan sekolah memiliki tanggung jawab memberikan kemampuan mengakses, menelusur, menemukan, mengevaluasi dan menggunakan berbagai sumber informasi dan pengetahuan secara beretika. Perpustakaan harus mandiri secara fungsional, tidak berada dibawah supervisi unit atau badan tertentu dalam sekolah. Tegasnya, secara fungsional perpustakaan dalam hal ini pustakawan tidak berada dibawah supervisi kepala sekolah.

Namun demikian, secara manajerial, perpustakaan harus berada dibawah supervisi manajemen sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah. Dalam menjalankan tugas administrasinya, perpustakaan harus bertanggung jawab ke kepala sekolah yang secara operasional harian dilakukan oleh wakil kepala sekolah bidang akademik. Apapun argumentasinya, perpustakaan **TIDAK BOLEH BERADA DIBAWAH SUPERVISI BAGIAN TATA USAHA (ADMINISTRASI) SEKOLAH**, karena kedua unit/ elemen sekolah ini memiliki hakikat, visi, misi, tujuan, tanggung jawab fungsi dan tugas yang jauh berbeda. Kehancuran perpustakaan sekolah yang kita alami selama ini, sebenarnya sebagian besar dipengaruhi

oleh lemahnya posisi perpustakaan secara organisatoris. Perpustakaan dianggap sebagai **unit administrasi** sehingga kebijakan-kebijakan perpustakaan dibuat oleh bagian tata usaha yang sama sekali tidak relevan dengan misi perpustakaan.

PENGEMBANGAN KOLEKSI

Inti keberadaan perpustakaan pada sebuah sekolah adalah koleksi. Gedung yang megah, fasilitas pendukung, meubuler yang modern dan pustakawan yang handal tidak akan bermakna apa-apa bila perpustakaan sekolah tersebut tidak mempunyai koleksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan proses pembelajaran. Yang membuat perpustakaan berbeda dari unit atau elemen lain dalam sebuah organisasi sekolah adalah koleksi. Tanpa koleksi, tidak ada perpustakaan. Oleh karena itu pengembangan koleksi harus menjadi prioritas sebuah perpustakaan sekolah.

Pengembangan koleksi perpustakaan sekolah bukan sebuah program musiman yang hanya berlangsung sesaat seperti pembangunan gedung dan fasilitas lainnya. Pengembangan koleksi perpustakaan sekolah harus berlangsung secara terus menerus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Kebutuhan terhadap informasi bagi siswa dan guru pada dasarnya adalah kebutuhan setiap saat. Kualitas sebuah koleksi perpustakaan tidak ditentukan oleh harga dan kuantitas sebuah koleksi, tapi oleh ketepatan keberadaannya pada saat dibutuhkan. Setiap siswa dan guru mempunyai kebutuhan informasi yang berbeda pada saat yang berbeda. Dengan demikian, perbedaan koleksi sebagai sumber informasi dan pengetahuan harus berkembang setiap saat.

Pertanyaan yang sering muncul adalah berapa judul/ eksemplar koleksi sebuah perpustakaan sekolah yang dikatakan ideal. Walaupun banyak lembaga atau pakar yang menetapkan jumlah judul dan eksemplar sebuah perpustakaan sekolah, jumlah judul dan eksemplar sebenarnya bukan tolok ukur idealitas koleksi sebuah perpustakaan sekolah. Yang menjadi ukuran idealitas dan kualitas koleksi sebuah perpustakaan sekolah adalah terpenuhinya kebutuhan informasi siswa dan guru untuk menjalankan proses pembelajaran secara optimal. Walaupun IFLA/ Unesco menetapkan bahwa perpustakaan sekolah kecil

hendaknya memiliki 2.500 judul koleksi yang paling sedikit terdiri dari 60% buku non-fiksi, kebutuhan informasi siswa dan guru tidak bisa ditentukan dengan angka tersebut. Walaupun jumlah koleksi yang dimiliki oleh sebuah perpustakaan sekolah mencapai 15.000 judul, kebutuhan informasi siswa dan guru tidak akan terpenuhi jika koleksi tersebut tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Dengan demikian, ukuran kualitas koleksi sebuah perpustakaan sekolah ditentukan oleh kebutuhan informasi siswa dan guru.

Oleh karena itu, perpustakaan sekolah hendaknya melakukan survey kebutuhan pengguna secara berkala. Survey ini bisa dilakukan sekali satu semester, pada saat sebelum proses pembelajaran semester bersangkutan dimulai, atau sepanjang hari. Pustakawan bisa menyebarkan angket survey kebutuhan, atau menyediakan kotak usulan pengadaan koleksi. Kedua cara ini bukan pilihan, tapi hendaknya berjalan secara bersamaan sehingga pustakawan memahami kebutuhan pengguna setiap saat. Untuk itu, perpustakaan perlu melakukan penyebaran informasi perkembangan dunia terbitan sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persoalan klasik yang sampai saat ini masih menjadi dilema pengembangan perpustakaan di negeri ini adalah sumber daya manusia. Setelah diamati lebih dekat, persoalan yang sebenarnya bukan terletak pada keterbatasan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualifikasi, tapi kesadaran birokrat untuk menjadikan pengembangan sumber daya manusia perpustakaan sebagai prioritas pembangunan pendidikan dan masyarakat. Alasan klasik yang selalu menjadi "kambing hitam" adalah anggaran; lembaga pemerintah dan lembaga swasta sering menempatkan program pengembangan sumber daya manusia perpustakaan pada urutan yang sangat tidak menguntungkan.

Oleh karena itu, pihak perpustakaan harus melakukan terobosan jangka pendek dan jangka panjang untuk merealisasikan ketersediaan sumber daya manusia perpustakaan sekolah yang profesional. Walaupun Undang-Undang Perpustakaan telah mewajibkan setiap sekolah memiliki pustakawan yang memenuhi kualifikasi kepustakawanan profesional, kenyataan hari ini menunjukkan bahwa keputusan parlemen ini tidak begitu efektif

memecahkan persoalan. Upaya yang kelihatan cukup mangkus adalah menjadikan perpustakaan dan pustakawan dengan kualifikasinya sebagai indikator penting akreditasi sebuah lembaga pendidikan. Umpamanya, sebuah sekolah tidak akan pernah mendapat akreditasi B jika sekolah tersebut tidak mempunyai pustakawan yang memenuhi kualifikasi profesional.

Ikhtiar lain yang sangat perlu dilakukan adalah pengembangan kemampuan teknis dan akademis pustakawan yang telah ada. Perlu disadari bahwa perkembangan dunia kepustakawanan berkembang jauh lebih cepat dari pada perkembangan dunia profesional lainnya. Keadaan ini dipengaruhi oleh perkembangan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Jika pustakawan tidak mengikuti kemajuan dan perkembangan dunia profesinya, maka layanan dan pemenuhan kebutuhan pengguna tidak akan berlangsung optimal. Bagaimana mungkin, umpamanya, seorang pustakawan mampu memenuhi kebutuhan pengguna tentang perkembangan mutakhir dalam bidang tertentu, jika ia tidak cakap menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Bagaimana mungkin, umpamanya, pustakawan bisa membantu siswa dan guru menentukan kualitas informasi, jika ia *"information illeterate"* (tidak memiliki kompetensi dalam hal literasi informasi).

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI

Ketika kita memasuki era informasi yang dikenal juga era pasca-modern, teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi menjadi isu penting dalam pengembangan perpustakaan sekolah. Teknologi ini masuk ke semua sisi kegiatan perpustakaan, mulai dari pengadaan koleksi, pengolahan koleksi, penelusuran informasi, sampai ke pekerjaan sirkulasi koleksi. Hampir semua perpustakaan sekolah telah mengenal teknologi informasi walaupun penerapannya dalam kegiatan layanan perpustakaan masih belum optimal. Teknologi ini, bahkan telah mengubah paradigma layanan perpustakaan dari yang selama ini menitikberatkan pada pengendalian koleksi ke akses informasi. Kepemilikan koleksi tidak lagi menjadi misi penting perpustakaan; misi utama perpustakaan era informasi adalah akses informasi tanpa batas. Teknologi informasi dan komunikasi telah mampu membuka

layanan perpustakaan 24 jam satu hari, 7 hari seminggu tanpa mengenal jarak. Perpustakaan disebutkan tak ber dinding lagi—*library without walls*.

Namun demikian penerapan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan sekolah masih belum optimal. Walaupun hampir semua perpustakaan sekolah di Kota Padang telah memiliki komputer, belum ada perpustakaan yang sekolah di Kota Padang yang bisa diakses oleh siswa dan guru dari rumah atau dari jarak jauh. Pemanfaatan Internet di perpustakaan sekolah masih belum optimal, sehingga siswa dan guru tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan sebagai pintu akses ke informasi global.

Oleh karena itu, perpustakaan sekolah hendaknya melakukan terobosan besar baik secara sendiri-sendiri maupun kolektif untuk mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah. Langkah awal yang perlu dilakukan adalah meyakinkan pembuat keputusan tentang pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan sekolah. Karena perubahan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sangat cepat, perencanaan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di perpustakaan sekolah hendaknya mencakup rentang waktu yang panjang—10 sampai 15 tahun. Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak harus direncanakan secara matang sehingga memenuhi kebutuhan jangka panjang. Pemanfaatan jaringan lokal dan Internet harus dioptimalkan sehingga perpustakaan bisa diakses dari berbagai lokasi oleh pengguna.

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA FINANSIAL

Semua pembicaraan terkait pengembangan perpustakaan sekolah bermula pada sumber daya finansial. Perpustakaan sekolah selalu dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana yang pada dasarnya bukan kurang. Anggaran perpustakaan sekolah dalam pengembangan berbagai program ayunan sering tidak menjadi prioritas. Ironisnya, pengalokasi dana untuk kepentingan lain, seperti sarana olah raga, taman, dan mobil operasional sering tidak mengalami kendala berarti. Oleh karena itu, perpustakaan sekolah harus mencari kiat dan trik untuk memecahkan persoalan klasik ini.

Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa usaha untuk meyakinkan pembuat keputusan adalah langkah awal yang sangat penting. Perpustakaan hendaknya telah memiliki rencana strategis dan rencana operasional yang matang yang disosialisasikan ke semua pemangku kepentingan (manajemen sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa). Dengan tersosialisasinya program-program yang meyakinkan semua pihak, perpustakaan sekolah akan mendapat dukungan yang luas.

Perpustakaan sekolah hendaknya melakukan berbagai kreatifitas untuk mengembangkan sumber daya finansialnya. Terlepas dari dana yang bersumber dari program pemerintah (seperti BOS), perpustakaan sekolah hendaknya memanfaatkan sumber dana lain seperti ikatan alumni, organisasi orang tua (komite sekolah) dan lembaga swasta. Untuk dapat mengoptimalkan sumber dana ini perpustakaan harus memiliki rencana strategis dan rencana operasional yang sangat matang yang dapat meyakinkan pihak yang bersangkutan untuk mendanai perpustakaan. Dengan demikian jargon "perpustakaan sebagai jantung sekolah" tidak tinggal jargon dan retorika belaka.

PENGEMBANGAN LITERACY INFORMASI

Perkembangan terkini dunia perpustakaan dan pendidikan adalah literasi informasi (*information literacy*). Walaupun telah menggema di seluruh penjuru dunia sejak dua dekade yang lalu, isu ini ternyata belum begitu populer di kalangan pakar pendidikan di Indonesia. Sebagian kecil pustakawan memang sudah intensif membicarakan isu ini namun suara sekelompok kecil pustakawan ini tidak begitu berarti mengubah keadaan di negeri ini. Oleh karena itu, isu ini harus diangkat pada setiap kesempatan dalam berbagai forum, termasuk forum ini.

Literasi informasi (*information literacy*) bukan terminologi baru, khususnya di kalangan ilmuan dan profesional perpustakaan dan informasi. Empat dekade yang lalu, istilah ini sudah diperkenalkan, dan banyak dibahas dalam berbagai forum diskusi dan jurnal ilmiah. Patricia Breivik, seperti diungkapkan oleh Marcum (2002) adalah penggagas awal konsep literasi informasi. Dalam berbagai presentasi dan artikelnya pada tahun 1980an, Breivik memperkenalkan model dan program literasi informasi. Secara tegas ia

mengungkapkan bahwa literasi informasi bukanlah isu yang terkait dengan pengajaran perpustakaan (*library instruction*), tapi konsep proses pembelajaran, khususnya pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*). Dalam bukunya yang kedua (*Student Learning in the Information Age*. Phoenix, Ariz.: American Council on Education/Oryx, 1998), Breivik mendefinisikan ulang istilah literasi informasi secara lebih luas yang mencakup pembelajaran berbasis-sumber (*resource-based learning*), penelitian *undergraduate*, pembelajaran jasa (*service learning*), dan pembelajaran berbasis-masalah (*problem-based learning*).

Pada dekade 1990an, isu literasi informasi semakin gencar dibahas yang sebagian besar mengaitkannya dengan topik-topik pembelajaran. Beberapa dari tulisan tersebut, seperti diungkapkan oleh Langford (1998), adalah Cindy, Crebert & O'leary (1994), Bruce (1996), Dow & Geer (1996), Wright & McGurk (1996) yang mengaitkan literasi informasi dengan isu guru pralayan (*preservice teachers*); Stephenson (1996) dan Mayer (1996) membahas isu literasi informasi dalam konteks siswa mandiri (*independent learners*); Henri (1988), Cooper & Henderson (1995) mengaitkan konsep literasi informasi dengan komunitas sekolah literat-informasi (*information-literate school community*); dan Johnson & Eisenberg (1991), Eisenberg & Johnson (1996), Mitchell (1996) dan Mobley (1996) membahas isu literasi informasi dalam hubungannya dengan teknologi informasi.

Pada dasarnya literasi informasi adalah sebuah kompetensi yang dimiliki setiap orang dalam menjalankan kehidupannya sebagai makhluk yang diberikan potensi dasar untuk berkembang melalui proses pembelajaran. Kompetensi ini mencakup kesadaran seseorang bahwa ia membutuhkan informasi untuk melanjutkan kehidupannya, yang kemudian diungkapkan dalam bentuk formulasi kebutuhan informasi. Setelah memahami kebutuhan informasi, kompetensi ini meningkat pada kemampuan menelusur dan menemukan informasi yang dibutuhkan tersebut. Pada tahap ini, seseorang dituntut untuk mampu memilah dan memilih informasi berdasarkan kualitas, relevansi, cakupan dan kecukupannya sesuai kebutuhan. Pengorganisasian informasi adalah elemen kompetensi literasi informasi berikutnya. Kompetensi ini mencakup kemampuan mendokumentasikan, menyusun, dan mengintegrasikan informasi dengan informasi terkait, sehingga melahirkan

informasi baru. Setelah informasi baru tercipta, ketrampilan berikutnya adalah kemampuan mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi baru tersebut dalam berbagai bentuk. Terakhir, kompetensi yang merupakan cakupan literasi informasi adalah sikap menghargai informasi sebagai sebuah proses yang tidak hanya lahir secara mandiri. Informasi baru adalah hasil proses pencernaan dan pengolahan berbagai informasi telah diciptakan orang lain sebelumnya.

Berbagai definisi literasi informasi telah dikemukakan oleh pakar dan lembaga yang bergerak dalam bidang perpustakaan dan informasi. Secara umum literasi informasi didefinisikan oleh Humes (2003) sebagai kemampuan seseorang untuk mengakses, mengevaluasi, mengorganisasikan, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber. Secara formal, American Library Association (ALA) mendefinisikan literasi informasi sebagai serangkaian kemampuan yang diperlukan oleh seseorang untuk menyadari bila informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Dijelaskan bahwa untuk menjadi *information literate* (melek informasi), seseorang harus mampu menyadari kapan informasi dibutuhkan dan mempunyai kemampuan menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi yang dibutuhkan tersebut. Dengan demikian, orang yang melek informasi adalah mereka yang telah belajar bagaimana belajar. Mereka tahu bagaimana belajar karena mereka mengetahui bagaimana ilmu pengetahuan diorganisasikan, bagaimana menemukan, dan bagaimana menggunakan informasi tersebut dengan cara yang mana orang lain bisa belajar mereka. Mereka adalah orang yang siap untuk belajar sepanjang hayat, karena mereka dapat menemukan informasi yang diperlukan untuk berbagai tugas atau keputusan di tangan.

Gilton (1994) secara tegas mengungkapkan bahwa literasi informasi bukan suatu yang sama dengan literasi komputer (*computer literate*), yang menghendaki seseorang memiliki ketrampilan memanipulasi piranti keras dan piranti lunak komputer. Ia juga menegaskan bahwa literasi informasi bukan literasi perpustakaan (*library literacy*) yang menuntut seseorang memiliki kemampuan menggunakan koleksi dan jasa perpustakaan. Namun demikian, kedua literasi tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan literasi

informasi. Literasi informasi lebih dari sekadar kemampuan mengakses informasi dan pengetahuan dengan bantuan teknologi; literasi informasi mencakup kualitas pengalaman belajar. Literasi informasi bukan hanya sekadar ketrampilan menelusur informasi dan menggunakan sumber-sumber referensi, karena hal itu semua adalah persoalan teknis; literasi informasi adalah tujuan bagi pelajar. Darch et al. (1997) menambahkan bahwa literasi informasi menuntut kesadaran tentang bagaimana sistem informasi bekerja, hubungan dinamis antara kebutuhan informasi tertentu dengan sumber informasi dan saluran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Secara lebih komprehensif, literasi informasi tidak hanya difahami sebagai sebuah kemampuan seseorang dalam menyadari bahwa ia membutuhkan informasi, menentukan dimana sumber, memperoleh, dan mengevaluasi informasi, tapi juga sikap dan integritas akademik seseorang terhadap informasi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Reed (2007) dengan membagi literasi informasi atas empat area fokus: 1) memulai dan menyelesaikan proses penelitian, 2) teknik penelusuran, 3) evaluasi materi yang ditemukan, dan 4) integritas akademik terhadap informasi yang digunakan. Secara lebih rinci, area pertama mencakup pengetahuan tentang lokasi bahan, sumber untuk memilih topik, dan kualitas bahan yang dibutuhkan. Pengetahuan dan ketrampilan yang harus dimiliki dalam area ini antara lain adalah cara menemukan topik yang hendak ditulis atau diteliti, pengetahuan tempat penelusuran jurnal dan buku, pengetahuan tentang peran layanan referensi (*reference desk*), pengetahuan tentang jumlah dan keragaman pangkalan data yang digunakan. Pengetahuan dan ketrampilan yang perlu dimiliki pada area fokus kedua adalah penggunaan operator Boolean (AND dan OR), dan *truncation* (pemotongan kata), teknik penelusuran yang efisien, pengecekan semua pilihan untuk artikel, penemuan informasi dalam buku (seperti indeks subjek), dan penemuan informasi bibliografis dalam buku. Pada area ketiga, mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan ketrampilan terkait jenis terbitan, penelusuran Internet, dan tinjauan sejawat. Sedangkan pada area terakhir, mahasiswa harus mampu menyitir (membuat sitasi) secara benar, menghindari pelanggaran/ pencideraan integritas akademik, dan mengetahui sistem sitasi dan gaya penulisan bibliografi (seperti MLA dan APA).

Dengan demikian, sampai saat ini ada dua pendekatan pemahaman terhadap literasi informasi literasi: pertama, pendekatan yang menitikberatkan bahasan literasi informasi pada disiplin ilmu kepustakawanan dan informasi, dan kedua adalah pendekatan yang berupaya menempatkan literasi informasi sebagai inti proses pembelajaran. Pendekatan pertama, yang didukung oleh sebagian besar pustakawan dan profesional informasi, melihat literasi informasi sebagai sebuah ketrampilan yang mencakup: 1) perumusan kebutuhan informasi, 2) pengidentifikasian sumber informasi, 3) penggunaan strategi pencarian informasi, 4) pemerolehan informasi, dan 5) evaluasi sumber informasi. Pendekatan kedua, yang didukung pakar ilmu informasi dan psikologi (seperti James W. Murcum dan Patricia Breivik), melihat literasi informasi sebagai proses yang dimulai dari pemerolehan data yang takterorganisasi, menjadi data yang terorganisasi (informasi), sampai ke penciptaan pengetahuan baru

REFERENSI

- Tofler, Alvin (1980). *The Third Wave*. New York : Morrow
- IFLA, Unesco (2002). *Pedoman Perpustakaan Sekolah*. Tersedia di:
<http://www.ifla.org/VII/s11/pubs/school-guidelines.htm>
- Marcum, James W (2002). Rethinking Information Literacy: *The Library Quarterly*, Vol. 72, No. 1 (Jan., 2002) , pp. 1-26 URL: <http://www.jstor.org/stable/4309580>
- Langford, Linda (1998). Information Literacy: A Clarification. *School Libraries Worldwide*, Volume 4, Number 1, 1998, 59-72. <http://www>.
- Humes, Barbara (2003). *Understanding Information Literacy*. Published by the US Federal government. <http://www>. Gilton (1994)
- Darch, C., Karelse, C., and Underwood, P. 1997. Alternative Routes on the Super Highway. Independent Online-Higher Education Review. *Independent Educational Media*. <http://www>.
- Reed, M., Kinder, D. & Farnum, C. (2007) Collaboration between Librarians and Teaching Faculty to Teach Information Literacy at One Ontario University: Experiences and Outcomes" *Journal of information literacy*, 1 (3), <http://jil.lboro.ac.uk/ojs/index.php/JIL/article/view/RA-V1-I3-2007-3>.